

PENGARUH DAU, DAK, PAD DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL

Indra Gunawan Siregar

Prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: ig217409@gmail.com

Artikel History:

Artikel masuk: 27 Juni 2022

Artikel revisi: 30 Juni 2022

Artikel diterima: 15 Juli 2022

Keywords:

Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada belanja modal provinsi Jawa Barat, periode waktu penelitian yang digunakan selama 6 tahun mulai dari tahun 2015 sampai 2020. Populasi penelitian ini meliputi seluruh kabupaten/kota provinsi Jawa Barat periode 2015-2020, Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh 10 kabupaten/kota. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs DJPK dan BPS. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sementara dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Local Own Revenue and Economic Growth on the capital expenditures of West Java province, the research time period used was 6 years from 2015 to 2020. The research population included all districts/regencies/ city of West Java province for the 2015-2020 period, the sampling technique used purposive sampling based on predetermined criteria obtained 10 districts/cities. The type of data used is secondary data obtained from DJPK and BPS websites. The analytical method used in this study uses panel data regression analysis. The results showed that the variable general allocation funds have an effect on capital expenditures, while special allocation funds, local revenue and economic growth simultaneously have no effect on capital expenditures.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, merupakan salah satu wujud dari amanah yang diemban pemerintah dan menjadi faktor utama dalam mengevaluasi kinerja masing-masing satuan perangkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan belanja modal memiliki tujuan untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian daerah, adanya peran pemerintah pusat dan peran pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada di setiap daerah. Namun dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang berlaku pada setiap daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan yang luas untuk mengelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka meningkatkan epektifitas dan efesiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang disebut sebagai otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak atau retribusi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi yang dilakukan menggunakan beban APBD. Adapun sumber dana bagi pemerintah daerah adalah DAU, PAD, DAK dan pinjaman daerah sumber dana tersebut diolah oleh pemerintah daerah melalui APBD.

Belanja modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap (santika, 2014). Belanja modal sangat berhubungan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Pengalokasian belanja modal itu sendiri ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui investasi aset tetap pemerintah daerah yaitu berupa

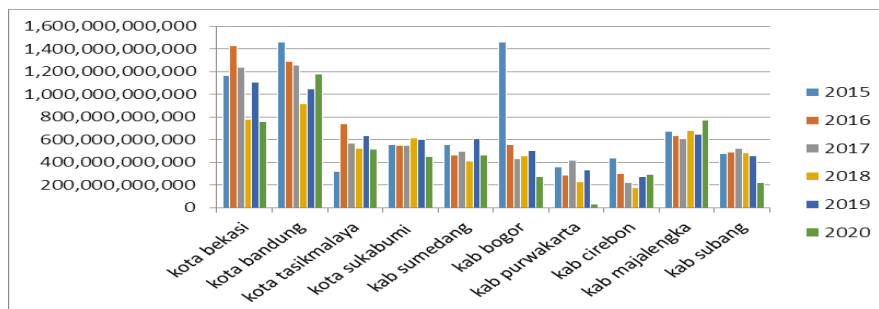
peralatan, bangunan, insfratuktur, dan aset tetap lainnya. Pemerintah daerah setiap tahun nya mengalokasikan dana belanja modal baik untuk mengganti aset lama ataupun pembelian aset baru.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Barat (Dalam Jutaan Rupiah)

Realisasi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BM	6,007,559	6,725,019	6,419,984	5,275,674	6,203,153	4,956,138
DAU	10,901,811	11,869,209	11,721,856	11,689,480	12,231,612	10,805,841
DAK	1,008,110	3,412,316	2,971,776	3,237,562	3,711,438	4,447,489
PAD	7,985,353	7,272,038	9,090,087	8,390,272	9,135,800	7,698,522
PE	1,02%	1,16%	1,64%	0,97%	1%	1,5%

Sumber : Data tahun 2021

Berdasarkan uraian tabel diatas belanja modal pada kab/kota provinsi jawa barat mengalami penurunan dari rentan waktu 2015 sampai 2020, sempat terjadi penurunan yang sangat drastis terjadi pada alokasi belanja modal tahun 2020 hal ini dikarenakan adanya dampak virus covid-19 sehingga anggaran APBN lebih difokuskan pada program pemulihan dan dukungan subsidi konsumsi rumah tangga bukan terfolus pada anggaran realisasi Belanja Modal hal itu yang menyebabkan belanja modal menurun pada tahun 2020.



Gambar 1. Realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan grafik, belanja modal mengalami penurunan cukup signifikan retan waktu 2015-2020, penyebab anggaran realisasi belanja modal pemprov jawa barat masih rendah dikarenakan realisasi anggaran belanja modal pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi atau keadaan naik turun tidak tepat, dapat dilihat pada tahun 2020 terdapat 7 kabupaten/kota yaitu kota pada provinsi Jawa Barat mengalami penurunan akibat adanya dampak dari virus covid-19 yang mengakibatkan anggaran APBN tahun 2020 lebih ditujukan untuk program

pemulihan dan dukungan subsidi konsumsi rumah tangga, bukan difokuskan kepada Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum mempengaruhi belanja modal, pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan DAU yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di masing-masing daerah, Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan yang mendanai belanja modal yang diperhitungkan oleh pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Rahajeng, 2021) mengemukakan bahwa DAU menimbulkan ketimpangan ekonomi antar provinsi dengan adanya desentralisasi fiskal, karena disebabkan oleh minimnya pajak dan sumber daya alam yang kurang digali oleh pemerintah daerah sehingga ketimpangan ekonomi tidak dapat dihindari.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus berupa kegiatan pendidikan, infrastuktur irigasi, infrastuktur air minum dan sanitasi serta kegiatan khusus lainnya yang penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat (Hapid et al., 2016). Penggunaan anggaran DAK ditunjukkan untuk kegiatan investasi jangka panjang, jangka pendek peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang termaksud dalam pengeluaran belanja modal. (Juniawan & Suryantini, 2018)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dari daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. PAD sangat diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah diharapkan menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan didaerahnya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak timbul permasalahan dalam hal pembiayaan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Dewi et al., 2013), Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat sebab pertumbuhan ekonomi menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu masalah perekonomian suatu negara dalam jangka yang cukup panjang karena pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat sampai dilapisan paling bawah. Untuk membiayai belanja modal pada pembangunan daerah salah satu modal yang digunakan bersumber dari pendapatan asli daerah.

Tinjauan Pustaka

Stewardship Theory

Perkembangan akuntansi *stewardship theory* berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi, manajemen dimana *steward* termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan *participal*. Teori ini menjelaskan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada hasil sasaran utama mereka untuk kepentingan organisasi (Hardiningsih et al., 2019). Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, dapat bertindak secara ekonomis dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, membuat pertanggungjawaban yang diamanahkan kepadanya, sehingga tercapai tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal juga dikategorikan sebagai belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan infestasi atau aset tetap seperti Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan , Belanja Modal

Jalan Irigasi dan Jaringan dan Belanja modal lainnya. Sumber pendanaan belanja modal bersumber dari penerimaan daerah yang dapat dialokasikan untuk mendanai belanja modal.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum menurut (Nordiawan, 2017:87) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus

Menurut (Syukri dan Haryano, 2018) dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah .

Pendapatan Asli Daerah

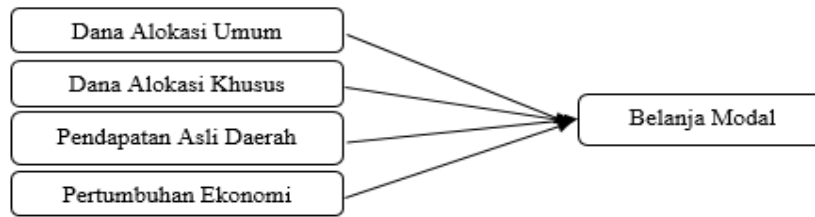
Menurut (Carunia, 2017) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD sdalam stuktur keuangan daerah maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Syukri & Hinaya, 2019) Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana pendapatan yang meningkat karena terjadi peningkatan pada produksi dan jasa, adanya peningkatan ini tidak berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk, dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Kemajuan yang terjadi di daerah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan daerah yang sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian



Gambar 2. Desain Penelitian

Perumusan Hipotesis

Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal

Dana alokasi umum merupakan salah satu dari dana perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber pada APBN, yang bertujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Dewi & Suyanto, 2016) Pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintah karena DAU juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Yuliantoni, (2021) DAU berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja modal yang artinya semakin besar dana alokasi umum yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah maka semakin tinggi belanja modal yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah .

H1 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal

Pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal

DAK adalah pendanaan yang bersumber dari APBN untuk setiap daerah tertentu yang bertujuan sebagai mendanai keperluan khusus melingkupi kebutuhan daerah yang merupakan kebutuhan seragam dengan program nasional. Pendanaan ini diutamakan untuk daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan dana dari pemerintah pusat yang direalisasikan melalui DAK (Juniawan & Suryantini, 2018). Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah, pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi, pembangunan, pengadaan, peningkatan perbaikan sarana <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/dmj>

publik. (Indriyani & Adi, 2018) mengatakan bahwa DAK dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah prioritas nasional yang telah ditetapkan.

H2 : Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang mendanai untuk membiayai setiap pengeluaran di daerahnya sendiri dalam meningkatkan pembangunan. Keuangan pemerintah menentukan mampu atau tidaknya daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Elim & Mamuka, 2014) Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain . Peningkatan PAD juga mendorong naiknya pengalokasian pada belanja modal kabupaten/kota (Iqbaal dan Abas, 2020)

H3 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian dalam mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dengan kenaikan output PDRB dan pendapatan riil perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran suatu wilayah. Apabila suatu daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka hal tersebut memiliki arti bahwa penyediaan infrastruktur di daerah tersebut memadai sehingga wilayah dapat dikatakan layak untuk menjadi lahan investasi (Arin dan Wulan, 2019). Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah daerah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi, bila pertumbuhan ekonomi baik maka pemerintah daerah akan meningkatkan alokasi belanja modal untuk memperbaiki sarana dan prasarana (Nurzen, 2016).

H4 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal

Tabel 2. Definisi dan pengukuran variabel

Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator (Pengukuran)
Belanja Modal	pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi	belanja modal = belanja tanah + belanja perlatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan irigasi + belanja aset tetap lainnya + belanja aset lainnya
Dana Alokasi Umum	sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.	Dana Alokasi umum = Celah fiskal + alokasi dasar
Dana Alokasi Khusus	tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang berhubungan dengan daerah.	$KU = (PAD + DAU + DBH + DBRDR) - \text{Belanja Gaji PNSD}$
Pendapatan Asli Daerah	pendapatan daerah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan.	$PAD = PD + RD + HPKD + PNSD$
Pertumbuhan Ekonomi	perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat	$\text{pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{(PDRB_{t-1})} \times 100\%$

Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2021).

Uji hipotesis

Uji-F

Uji F ini biasa digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan kedalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau dengan kata lain model *fit* atau tidak. Apabila uji F ini tidak berpengaruh maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan.

Koefisien Diterminasi

Hasil uji koefisien diterminasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil *R-squared* akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel terikat dalam menjelaskan variabel bebas

Uji-T

Uji-T ini . pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2012: 88).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 km² memiliki jumlah penduduk sebanyak 46.497.175 juta jiwa. Penduduk ini tersebar di 26 Kab/Kota yang meliputi 17 kabupaten dan 9 kota sedangkan jumlah kecamatan 625 dan jumlah desa/kelurahan 5.877. kondisi seperti ini berpotensi besar untuk lahan pemukiman dan industri, sehingga dengan wilayah yang sedemikian luas pertumbuhan perekonomian dengan sumber daya manusia di Jawa Barat berpotensi untuk berkembang.

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

	BM	DAU	DAK	PAD	PE
Mean	26.98517	27.74617	26.24500	26.70083	0.119167
Median	27.01000	27.80500	26.41000	26.86000	0.090000
Maximum	28.01000	28.40000	27.11000	28.58000	1.250000
Minimum	24.06000	26.92000	23.60000	0.090000	-0.170000
Std. Dev.	0.633929	0.333020	0.717580	3.570266	0.186314
Skewness	- 1.496291	-0.682413	-1.302607	-7.052717	4.058711
Kurtosis	8.933596	2.855366	4.920685	53.20776	24.33284
Jarque-Bera	110.4078	4.709179	26.19044	6799.457	1302.457
Probability	0.000000	0.094932	0.000002	0.000000	0.000000
Sum	1619.110	1664.770	1574.700	1602.050	7.150000

Sum Sq.	23.71010	6.543218	30.38030	752.0611	2.048058
Dev.					
Observations	60	60	60	60	60

Sumber data diolah : eviews 9.0

Data (*observations*) yang digunakan sebanyak 60 data.

- Nilai mean terbesar dihasilkan oleh Dana Alokasi Umum sebesar 26.98517 yang dimiliki oleh kota bandung pada tahun 2015. sementara mean terkecil sebesar 0.119167 yang dihasilkan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi yang dimiliki oleh kabupaten majalengka pada tahun 2017 sementara mean dari variabel lain yaitu DAK sebesar 26.24500, PAD sebesar 26.70083 dan BM sebesar 26.98517.
- Nilai maximum terbesar dihasilkan oleh PAD sebesar 28.58000 yang dimiliki oleh kota bandung tahun 2017. sementara maximum terkecil dihasilkan oleh Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1.250000 yang dimiliki oleh kabupaten majalengka pada tahun 2018. sementara itu maximum pada variabel lain sebesar 26.92000 oleh variabel DAU, sebesar 27.11000 oleh variabel DAK, dan sebesar 28.01000 oleh variabel BM.
- Nilai minimum sebesar 26.92000 oleh variabel DAU yang dimiliki oleh kota bandung tahun 2019. sementara minimum terkecil sebesar 0.090000 oleh PAD yang dimiliki oleh kabupaten bogor. sementara itu minimum dan variabel lainnya yaitu DAK sebesar 23.60000, pertumbuhan ekonomi sebesar -0170000 dan sebesar 24.06000 oleh belanja modal.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Dependent Variable: BM
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/06/21 Time: 17:30
Sample: 2015 2020
Periods included: 6
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 60
Swamy and Arora estimator of component variances

R-squared	0.508789	Mean dependent var	9.329554
Adjusted R-squared	0.473064	S.D. dependent var	0.422127
S.E. of regression	0.306423	Sum squared resid	5.164242
F-statistic	14.24204	Durbin-Watson stat	1.549994
Prob(F-statistic)	0.000000		

Nilai F-tabel dihitung sebagai berikut F-statistic menunjukkan f-statistic (14.24204) > F-tabel (2,54) dan nilai prob (F-statistic) 0.000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang artinya variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari DAU, DAK, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Artinya uji model dalam penelitian ini layak dan uji hipotesis dapat dilanjutkan.

Tabel 5. Koefisien Dterminasi

Dependent Variable: BM Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 08/06/21 Time: 17:30 Sample: 2015 2020 Periods included: 6 Cross-sections included: 10 Total panel (balanced) observations: 60 Swamy and Arora estimator of component variances			
R-squared	0.508789	Mean dependent var	9.329554
Adjusted R-squared	0.473064	S.D. dependent var	0.422127
S.E. of regression	0.306423	Sum squared resid	5.164242
F-statistic	14.24204	Durbin-Watson stat	1.549994
Prob(F-statistic)	0.000000		

Pada tabel diatas menunjukkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0.473064 artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya BM dapat dijelaskan oleh DAU, DAK, PAD dan PE sebesar 47,3 persen sementara sisanya yaitu sebesar 52,7 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 6. Uji-T

Dependent Variable: BM Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 08/06/21 Time: 17:30 Sample: 2015 2020 Periods included: 6 Cross-sections included: 10 Total panel (balanced) observations: 60 Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.858825	5.189406	-1.899799	0.0627
DAU	1.448564	0.196512	7.371379	0.0000
DAK	-0.123429	0.066384	-1.859315	0.0683
PAD	-0.004407	0.012755	-0.345505	0.7310
PE	0.075181	0.237208	0.316940	0.7525

Tabel 7. Ringkasan Hasil Rangkuman Hipotesis

Variabel	Nilai t-statistic	Pro signifikasi	Keterangan
C	-1.899798	0.0627	
DAU	7.371379	0.0000	Diterima
DAK	-1.859315	0.0683	Ditolak
PAD	-0.345505	0.7310	Ditolak
PE	0.316940	0.7525	Ditolak
<i>Adjusted R-squared</i>	0.473064		
F-statistic	14.24204		
Prob (F-statistic)	0.000000		

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian menyatakan variabel DAU memiliki nilai t-statistic sebesar 7.371379 > nilai t-tabel 2,00404 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 < 0.05, maka dapat disimpulkan H_a diterima artinya variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan peranan DAU terletak dalam kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah yang dalam hal ini Pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Umum sebagai sumber utama pendanaan Belanja Modal pemerintah daerah yang nantinya dimaksudkan untuk menambah aset pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk menambah pendapatan daerah. Semakin banyak anggaran Dana Alokasi Umum yang direalisasikan maka semakin tinggi pula anggaran realisasi Belanja Modal

Hasil ini sejalan dengan (Yawa dan Runtu, 2015) menemukan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal dikarenakan DAU untuk suatu daerah kab/kota yang ditetapkan APBN dengan prosi kab/kota yang bersangkutan, semakin banyak DAU yang diterima maka semakin tinggi pula anggaran realisasi belanja modal. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (made ari juniawan, 2018) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Adanya pengaruh DAU terhadap belanja modal dapat memberikan penjelasan

<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/dmj>

bahwa Dana Alokasi Umum memiliki keterikatan dengan pembangunan infrastruktur daerah. Keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah dapat dikatakan karena bantuan berupa DAU yang dikirimkan dari nasional dan dipergunakan penda ditujukan untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah melalui belanja daerah terutamanya Belanja Modal. DAU yang semakin besar diberikan dari pusat, maka Belanja Modal akan semakin besar yang dianggarkan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian menyatakan variabel DAK memiliki nilai t-statistic sebesar $-1.859315 < t\text{-tabel } 2,0040$ dan nilai probabilitas sebesar $0.0683 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak artinya variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hal tersebut dikarenakan meskipun untuk alokasinya sendiri dana alokasi khusus cenderung meningkatkan aset pemerintah daerah namun hal tersebut tidak bisa menjadi gambaran pasti sebab alokasi DAK setiap tahunnya berubah dan cenderung mengalami tingkat fluktuatif yang tinggi sehingga pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal cenderung sedikit.

Hasil berbedsa ditemukan (Juniawan, 2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada. penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sudrajat & Purniawati, 2018) menjelaskan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal hal ini dikarenakan kurangnya perencanaan yang baik terhadap pengalokasian dana alokasi khusus pada belanja modal kab/kota atau peningkatan dana alokasi khusus dimanfaatkan untuk pengalokasian belanja lain selain belanja modal, penelitian ini juga sejalan dengan (M.syukri dan hinayah, 2019) menyatakan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh terhadap dana anggaran realisasi DAK belum meluas ke daerah yang tertinggal serta yang kapasitas pemerintahanya belum memadai dalam memberikan pelayanan public.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.

Hasil pengujian menyatakan variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai t-statistic sebesar $0.345505 > t\text{-tabel sebesar } 2,00404$ dan nilai probabilitas sebesar $0.7310 > 0.05$, Hal ini menunjukkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Sehingga H_a ditolak artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh

terhadap belanja modal. Hal ini terjadi dikarenakan adanya nilai PAD yang rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah dapat meningkat PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan upaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Hasil berbeda ditemukan (Syahdila, 2021) bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap belanja modal, artinya jika pendapatan asli daerah terjadi peningkatan maka pendapatan daerah pada setiap tahunnya juga akan semakin meningkatkan alokasi belanja modal. Sehingga dana alokasi perimbangan yang biasa dialokasikan untuk dapat menutupi ketimpangan anggaran pemerintah daerah akan semakin berkurang dan hal tersebut tentunya menjadi perkembangan positif yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik kedepannya. Penelitian ini sejalan dengan (Yuliantoni & Arza, 2021) menjelaskan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal hal ini dikarenakan kab/kota dengan pendapatan asli daerah yang besar tidak memiliki belanja modal yang besar yang disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk belanja lain, seperti belanja rutin/belanja operasional.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian menyatakan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t-statistic sebesar $0.316940 > t\text{-tabel}$ sebesar $2,00404$ dan nilai probabilitas sebesar $0.7525 > 0.05$ maka dapat disimpulkan H_a ditolak artinya bahwa variabel PE tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak diikuti oleh belanja modal di suatu daerah, Hal ini disebabkan adanya penurunan dana anggaran belanja modal, namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi justru mengalami peningkatan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Nurzen, 2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal hal ini dikarenakan bertambahnya infrastruktur dan perbaikan diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi, apabila pertumbuhan ekonomi baik maka pemerintah daerah akan meningkatkan alokasi belanja modal untuk memperbaiki sarana dan prasarana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data panel dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1). Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh DAU terhadap Belanja Modal dapat memberikan penjelasan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki keterikatan dengan pembangunan infrastruktur daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka semakin tinggi pula anggaran realisasi belanja modal. 2). Dana Alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi jawa barat periode 2015-2020. Hal ini dikarenakan kurangnya perencanaan yang baik terhadap pengalokasian dana alokasi khusus pada belanja modal kab/kota atau peningkatan dana alokasi khusus dimanfaatkan untuk pengalokasian belanja selain belanja modal. Dana Alokasi Khusus yang diterima masih belum meluas ke daerah yang tertinggal serta yang kapasitas pemerintahnya belum memadai dalam memberikan pelayanan public. 3). Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi jawa barat periode 2015-2020. Hal ini dikarenakan kab/kota dengan pendapatan asli daerah yang besar tidak memiliki belanja modal yang besar yang disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk belanja lain, seperti belanja rutin/ belanja operasional. 4). Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi jawa barat periode 2015-2020. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh anggaran belanja modal yang signifikan, hal ini disebabkan adanya penurunan dana anggaran belanja modal namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi justru mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen*, XV(1), 42-56.
- Anika , S., & Sishadiyati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL* Volume 3 No 2 July 2021 E-ISSN: 2656-4378 P-ISSN: 2655-5689 *Journal* Homepage: <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/Jej/Index>,

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arry Eksandi. (2018). *METODE PENELITIAN AKUTANSI DAN MANAJEMEN* (Mohammad Zulman Hakim (Ed.)). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Carunia Mulya Firdausi. (2017). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewi, S. P., & Suyanto, S. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.24964/Ja.V3i1.40>
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2017). Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2009*, 85-94.
- Elim, I., & Mamuka, V. (2014). Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 646-655. <https://doi.org/10.35794/Emba.V2i1.4379>
- Faramatha Dan Fajar Budiasih. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Berdasarkan Perspektif Flypaper Effect (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat) Helaria Sulas Tika Frans*.
- Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum DDU Dana Alokasi Khusus DAK Dan Pendapatan Asli Daerah PAD Terhadap Belanja Modal. *Kinerja*, 14(2), 85. <https://doi.org/10.29264/Jkin.V14i2.2483>
- Hapid, H., Halim, M., & Wulandari, Y. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.35906/Jep01.V2i1.152>
- Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.21043/Aktsar.V2i1.4963>
- Indriyani, I., & Adi, S. W. (2018). *Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4 . 0 Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4 . 0*. 261-270.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255.
- Lasmini, & Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *Ebbank*, 10(1), 29-40.
- Nawawi. (1993). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Gajah Mada University Press.
- Nurzen, M. (N.D.). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*.
- Perbendaharaan, P. D. J., & 33/Pb/2008, N. P.-. (2008). *Pedoman Penggunaan Akun*

- Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Dan Belanja Modal Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/Pmk.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar.*
Prof. Dr. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Saputra, I. M. A. P. Dan M. D. (2015). *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan. Penganggaran Dan Analisis Anggaran Penjualan*, 14(1), 10.
- Septiana, E. (2017). *Kajian Pustaka Tentang Laporan Keuangan Sektor Publik. Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) -, 2017, 1-7.*
- Sestu Rahajeng, A., Martha Hendrati, I., Asmara, K., Ekonomi Pembangunan, J., Ekonomi Dan Bisnis, F., & Veteran Jawa Timur, U. (N.D.). *Pengaruh Pajak Daerah, Dau, Dak Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019).*
- Sudrajat, M. A., & Purniawati, I. D. (2018). Analisis Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(1), 56.
<https://doi.org/10.25273/Inventory.V1i1.2284>
- SUGIYONO. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (ALFABETA (Ed.))*.
- Sriyana, Jaka. 2014. *Metode Regresi Data Panel.* Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal Of Economic, Management And Accounting*, 2(2), 30.
<https://doi.org/10.35914/Jemma.V2i2.245>
- UUD NO 33 Tahun 2004. (2004). *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*
- Wertianti, I. G. A. G. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 567-584.
- Yuliantoni, S., & Indra Arza, F. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2015-2019. In *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 3, Issue 1). Online. <http://jea.pj.unp.ac.id/index.php/jea>